



PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DESA BAJUR, KECAMATAN LABUAPI, KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Mila Pilaili¹, Herlina Pusparini², Nurabiah³

^{1,2,3} Universitas Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Juni 2022

Disetujui: 2 Oktober 2022

Dipublikasikan:

15 Oktober 2022

Kata Kunci:

Kepemimpinan Kepala

Desa, Partisipasi

Masyarakat,

Pembangunan Desa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala desa dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa. Penelitian ini berlokasi di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi. Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, BPD, dan masyarakat sebanyak 14 orang. Data penelitian ini berupa data primer yang diperoleh melalui kegiatan wawancara langsung dengan informan dan diperkuat dengan dokumentasi. Setelah diuji keabsahannya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan reduksi data, menampilkan kembali data, dan menyimpulkan serta memverifikasi. Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang baik antara kepala desa dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan seorang kepala desa dalam melaksanakan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Dari ketiga indikator ini kepala desa sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana perannya sebagai kepala desa memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun desa, memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan memberikan dorongan kepada masyarakat. Begitu juga dari masyarakatnya, masyarakat sangat antusias membantu kepala desa disetiap kegiatan desa seperti pembangunan desa dengan ikut berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil.

THE LEADERSHIP ROLE OF THE VILLAGE HEAD TO INCREASE COMMUNITY PARTICIPATION IN THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF THE VILLAGE (CASE STUDY AT THE BAJUR VILLAGE GOVERNMENT, LABUAPI DISTRICT)

Keywords : Village

Head, Leadership

Community

Participation,

Village

Development

Abstract

This Study aims to determine the leadership role of the village head and to determine community participation in village physical development. This research is located in Bajur Village Government, Labuapi District. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The informants in this study

were the village head, the village secretary, BPD, and the community as many as 14 people. This research data is primary data obtained through direct interviews with informants and strengthened by documentation. After being tested for validity, the data obtained were analyzed using data reduction, re-displaying the data, and concluding and verifying. This study uses the theory of stewardship where the results of this study indicate that there is a good relationship between the village head and the community. This can be seen from the success of a village head in carrying out his role as a motivator, facilitator, and mobilizer. Of these three indicators, the village head has carried out his duties and responsibilities as well as his role as the village head to motivate the community to jointly build the village, provide the facilities needed by the community, and provide encouragement to the community. Likewise from the community, the community is very enthusiastic about helping the village head in every village activity such as village development by participating in the planning, implementation, evaluation, and utilization stages of the results.

© 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

¹ pilailimila26@gmail.com,

² h.pusparini@unram.ac.id,

³ nurabiah@unram.ac.id

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional, karena desa merupakan ujung tombak dalam menggapai keberhasilan program yang direncanakan oleh pemerintah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berlaku dalam sistem Pemerintahan Indonesia, bahwa kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Maka salah satu tugas seorang kepala desa adalah melaksanakan pembangunan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbang Desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa dengan tujuan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang dilaksanakan satu tahun sekali dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk periode 6 tahun. Proses pembangunan yang dilaksanakan di desa sangat mengutamakan bantuan atau partisipasi dari masyarakat, karena partisipasi

masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti Pemerintah Desa. Sehingga dengan adanya keterlibatan Pemerintah Desa, besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan. Kepemimpinan adalah faktor terpenting dalam menunjang keberhasilan pembangunan yang dilakukan pada suatu organisasi atau pemerintahan, karena kepemimpinan dapat mempengaruhi masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai visi dan misi pembangunan desa.

Adapun penelitian yang mendukung mengenai kepemimpinan kepala desa, seperti yang dilakukan oleh (Masruhin et al., 2015), (Lamangida et al., 2017), (Salma et al., 2021) dan (Rismayana (2021). Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Masruhin et al. (2015) , dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa dikenal dengan kepala desa yang mempunyai gaya kepemimpinan yang bersifat demokratis. Dimana dalam setiap kegiatannya kepala desa selalu melibatkan pihak-pihak terkait. Lamangida et al. (2017) mengatakan bahwa kinerja kepemimpinan harus sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan dan kepala desa harus mampu menjadi motivator serta mobilisator bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Salma et al. (2021) mengatakan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki peran yang sangat strategis untuk keberhasilan pembangunan fisik desa karena desa merupakan pemerintahan terkecil. Dalam penelitian tersebut untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala desa dilihat dari indikator-indikator yang digunakan yaitu indikator kepemimpinan sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rismayana (2021) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa telah memberikan kontribusi yang baik terhadap pembangunan, serta mempunyai seorang pemimpin dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penelitian ini didukung oleh teori *stewardship*, yang berarti bahwa adanya hubungan antara yang memimpin dan yang dipimpin, dimana perilakunya bersifat kebersamaan dan melayani orang lain. Dengan adanya tujuan yang akan dicapai, kepala desa selaku pemimpin dapat melakukan kerja sama yang baik dengan masyarakat dengan cara ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa, karena masyarakatlah kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut dan adanya peran kepemimpinan kepala desa yang berintegritas tinggi. Mengingat bahwa teori *stewardship* ini adalah teori yang mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.

Di dalam pelaksanaan pembangunan, kepala desa selaku pemimpin formal di desa harus mampu menyediakan, mendorong dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan. Kepala desa sebagai pemimpin memiliki peran sebagai motivator yang berusaha untuk memotivasi dan memberi dukungan penuh kepada masyarakat dengan cara memberikan penghargaan kepada masyarakat yang antusias dalam berpartisipasi. Dan kepala desa sebagai fasilitator, artinya kepala desa sebagai penyedia sarana dan prasarana dalam proses pembangunan. Sedangkan peran kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa sebagai pendorong dan penggerak masyarakat untuk ikut melaksanakan kemajuan desa. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan atau partisipasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari aparat desa dan masyarakat desa. Partisipasi masyarakat memiliki intensitas ataupun bentuk partisipasi yang berbeda-beda sesuai dengan tahap atau tingkatan pembangunan desa yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil.

Penelitian ini dilakukan disalah satu desa di Kecamatan Labuapi, yaitu Desa Bajur dimana di Desa Bajur dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Bapak Ahmad Husni, SH, beliau sudah memimpin selama dua periode, yang berarti kepemimpinannya memberikan dampak positif kepada masyarakat. kepala desa melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat untuk menghadiri kegiatan musyawarah yang diadakan oleh desa dengan tujuan bersama-sama membangun desa. adapun anggaran dana desa bajur yang diterima dari tahun 2015 sampai 2021 sebagai berikut:

Tabel 1
Besar Dana Desa Tahun 2015 – 2021

Tahun	Dana Desa
2015	Rp323.749.500
2016	Rp740.911.000
2017	Rp977.061.000
2018	Rp1.055.519.000
2019	Rp1.316.719.000
2020	Rp1.456.059.000
2021	Rp1.378.227.000

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajur

Berdasarkan tabel 1 di atas, dana desa yang terima oleh Desa Bajur selalu mengalami perubahan untuk setiap tahunnya. Dana desa ini diprioritaskan untuk melaksanakan program pembangunan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana

kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi, pendidikan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahunnya dana desa Desa Bajur sepenuhnya digunakan untuk kegiatan pembangunan, akan tetapi berbeda halnya dengan tahun anggaran 2021.

Dana desa untuk tahun anggaran 2021, Pemerintah Desa Bajur tidak dapat melaksanakan pembangunan sepenuhnya karena sebagian besar dana ini digunakan untuk menanggulangi kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pandemi covid-19. Melalui dana desa pihak pemerintah desa memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat lansia, janda, dan fakir miskin yang berjumlah 110 orang penerima manfaat dengan anggaran Rp396.000.000 untuk jangka waktu 1 tahun (12 bulan).

Hal lainnya digunakan untuk pembangunan talud jalan beton dan drainase yang berlokasi di Dusun Kalijaga dengan anggaran dana sebesar Rp152.473.500, Pembangunan Jembatan Dusun Kalijaga dengan anggaran Rp24.458.600, pembangunan jalan beton dan pipanisasi yang dilaksanakan di Dusun Bajur Induk dengan anggaran sebesar Rp17.161.625. Adanya pandemi covid-19 membuat kepala desa untuk membuat kebijakan dalam memutuskan penundaan pembangunan desa yang sudah direncanakan sebelumnya melalui musrenbang desa. Ini menandakan bahwa adanya kecakapan seorang pemimpin dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan desa dengan sebaik-baiknya yang bersumber dari dana desa untuk anggaran 2021 sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan dana desa ini, baik dari kesejahteraan masyarakat yang berupa bantuan atau pembangunan desa.

Adanya partisipasi masyarakat dan peran kepemimpinan kepala desa dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat perwujudannya terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan arahan, strategi serta tujuan yang akan dicapai dari sebuah kebijakan. Sedangkan peran kepemimpinan kepala desa perwujudannya terlihat dari adanya dorongan, motivasi serta penyediaan sarana prasarana yang harus dilakukan untuk dapat menggerakkan keinginan masyarakat untuk peduli dengan pembangunan desanya sendiri. Dari uraian di atas serta berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA”** penelitian ini akan dilakukan di Pemerintahan Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Dengan tujuan untuk mengetahui peranan kepemimpinan kepala desa untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa dan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara, dimana dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah *draft* program kerja, *banner* visi dan misi, daftar hadir peserta musyawarah desa, laporan hasil musyawarah desa, dan laporan keuangan desa yang akan menunjang dan memperkuat data utama untuk dianalisis, dan wawancara dilakukan untuk memvalidasi hasil dokumen yang ada. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu, kepala desa sebagai informan kunci, masyarakat sebanyak 14 orang sebagai informan utama, dan sekretaris desa, BPD sebagai informan tambahan. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Desa Bajur, Kecamatan Labuapi. Data yang diperoleh kemudian diolah diperiksa kredibilitasnya, agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai titik tolak penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektivitas) (Sugiyono, 2016). Namun yang utama dalam penelitian ini untuk keabsahan data adalah uji kredibilitas data. Agar data dan hasil wawancara yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan data, maka penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dengan cara perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan menggunakan bahan referensi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kepemimpinan Kepala Desa

Peranan kepemimpinan kepala desa dilihat dari indikator motivator, fasilitator, dan mobilisator.

Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Motivator

Motivasi dalam hal pembangunan desa bertujuan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Sebagai seorang pemimpin formal dalam desa, kepala desa sebisa mungkin memberikan motivasi dan mendorong minat masyarakat untuk ikut andil dalam proses

pembangunan yang ada di desa, karena tujuan dari pembangunan desa tidak akan tercapai tanpa adanya campur tangan dari pemerintah desa dan masyarakat. Hasil penelitian terkait dengan peranan kepemimpinan kepala desa sebagai motivator dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Ringkasan hasil wawancara pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang penulis peroleh mengenai bagaimana kepala desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta peran kepala desa sebagai motivator untuk mendukung masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa, dapat dikatakan bahwa kepala desa sudah sangat baik dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam desa sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dimana dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai tugas kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan juga kepala desa sudah cukup baik menjadi pemimpin di mata masyarakat dengan memberikan dukungan dan motivasi untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa dan kepala desa selalu melibatkan masyarakat dalam setiap program-program yang ada di desa. Hasil penelitian ini diperkuat dengan adanya bukti dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara, dokumen tugas dan tanggungjawab kepala desa, foto kegiatan sosialisasi kepala desa.

Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Peran kepala desa sebagai fasilitator artinya kepala desa sebagai penyedia fasilitas. Tugas kepala desa menyediakan dan melengkapi apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembangunan desa yang dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD). Peran kepala desa sebagai fasilitator juga merupakan salah satu upaya untuk

Tabel 2

Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Motivator

No	Item Motivator	Motivator
1	Tugas dan tanggung jawab kepala desa	Tugas dan tanggung jawab kepala desa sesuai dengan pedoman yang ada yaitu permendagri undang-undang No. 6 Tahun 2014
2	Dukungan dan memotivasi masyarakat agar ikut andil dalam kegiatan pembangunan	Tetap melibatkan masyarakat dalam kegiatan desa

mencapai keberhasilan pembangunan fisik desa sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan melalui ADD dan direncanakan dalam kegiatan musrenbang desa yang disusun dalam RKPDes yang akan ditetapkan menjadi APBDes. Hasil penelitian terkait dengan peranan kepemimpinan kepala desa sebagai fasilitator dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Ringkasan hasil wawancara pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa sebelum penyediaan kelengkapan sarana (seperti semen, pasir, batu dan alat berat) dan prasarana (seperti rabat jalan, gorong-gorong, dan talud) dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan masyarakat, kepala desa bersama dengan TPKD bekerjasama untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan desa. Sebelum dilaksanakannya pembangunan desa, kepala desa bersama dengan tim melakukan kegiatan musyawarah untuk menentukan pembangunan apa saja yang harus dikerjakan dan menghitung biaya-biaya yang nantinya akan dikeluarkan sesuai dengan alokasi dana desa yang tersedia. Dalam hal ini, peran kepala desa sebagai fasilitator sudah cukup baik, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kepala desa dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui penyediaan fasilitas-fasilitas dari segala aspek baik itu aspek kesehatan seperti pustu, puskesmas, dan posyandu, di aspek pendidikan seperti paud dan diniyah, di aspek ekonomi seperti penyaluran bantuan (BLT) , dan aspek lainnya.

Tabel 3

Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Fasilitator

No	Item Fasilitator	Fasilitator
1	Penyedia kebutuhan masyarakat dalam pembangunan desa	Tugas seorang kepala desa sebagai fasilitator yaitu sebagai penyedia kebutuhan masyarakat yang dibantu oleh TPKD (Tim Pengelola Kegiatan Desa)
2	Fasilitas dan kelengkapan program pembangunan desa	Untuk kelengkapan sarana dan prasarana dalam menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah desa sudah lengkap sesuai dengan apa yang dianggarkan pada musyawarah dusun ke tingkat desa yang ditetapkan di dalam RKPDes

Hasil dari penelitian ini didukung dengan adanya dokumentasi dalam bentuk foto terkait sarana dan prasarana seperti penyediaan bahan dan alat, serta dokumentasi berupa laporan keuangan desa.

Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Kepala desa sebagai mobilisator artinya kepala desa memiliki peran sebagai penggerak dalam kegiatan pembangunan desa. Sebagai pemimpin, kepala desa harus mampu menggerakkan masyarakat dalam proses pembangunan desa terutama dalam mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat menjalankan program-program desa seperti pembangunan yang ada di desa. Hasil penelitian terkait dengan peranan kepemimpinan kepala desa sebagai mobilisator dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Peranan Kepemimpinan
Kepala Desa Sebagai Mobilisator

No	Item Mobilisator	Mobilisator
1	Mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam mencapai tujuan	Ikut terlibat langsung dalam meninjau hasil pembangunan desa di samping menunggu hasil laporan dari tim pengawas pembangunan desa yaitu BPD.
2	Menjadi pengawas dalam proses pembangunan desa	Memberikan orang lain wewenang yaitu Badan Pemasarakatan Desa (BPD), karena tupoksi dari pengawasan pembangunan adalah bagian dari tupoksi BPD
3	Metode yang digunakan dalam hal pembangunan desa	Mentransparankan semua anggaran entah itu dari dana desa ataupun dari alokasi dana desa untuk semua jenis kegiatan pembangunan desa melalui spanduk, banner, dan papan informasi desa.

Ringkasan hasil wawancara pada tabel 4 dapat disimpulkan bahwa tupoksi dari pengawasan kegiatan pembangunan desa ada pada BPD, dimana BPD akan melaporkan semua kegiatan mengenai pembangunan desa kepada kepala desa dan nantinya kepala desa akan turun melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berjalan. Dengan perannya sebagai mobilisator kepala desa sebagai pengarah dan penggerak masyarakat agar bersama-sama terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Masyarakat perlu diarahkan agar paham bagaimana pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa. Untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, maka kepala desa secara langsung memberikan contoh dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam membangun desa, dan perlunya transparansi dari pemerintah desa untuk mentransparankan dana-dana yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dan dana lainnya agar dari sini masyarakat bisa melihat sejauh mana kemajuan desa

dalam membangun desa melalui transparansi yang dilakukan oleh kepala desa. Hasil penelitian ini didukung oleh dokumentasi foto kegiatan wawancara dan *job desc* kepala desa.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa dilihat dari indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil.

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa mengadakan musyawarah antar dusun dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat per dusun di dalam dusunnya sendiri, lalu kemudian setelah itu pemerintah desa mengumpulkan semua tokoh masyarakat di desa untuk memusyawarahkan apa saja yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa di setiap dusun.

Dalam tahap perencanaan ini, pemerintah desa mengadakan musrenbang desa setiap sekali setahun dengan mengundang semua tokoh masyarakat seperti tokoh petani, pendidik, perempuan, miskin, pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya untuk merembuk hasil dari musdus yang dilaksanakan sebelumnya. Hasil penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5
Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan

No	Item Perencanaan	Perencanaan
1	Antusias masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa	Kurangnya antusias masyarakat dalam tahap perencanaan untuk menghadiri undangan musyawarah dari tingkat dusun ke tingkat desa. Hal ini disebabkan oleh masyarakat masih berpikir bahwa pembangunan adalah tanggungjawab sepenuhnya dari pemerintah, ketidakpedulian masyarakat, dan masyarakat sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan musyawarah.

2	Keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan ide atau pemikiran	Tetap memberikan ide, pikiran, dan usulan kepada pemerintah desa melalui masyarakat yang hadir sebagai perwakilan untuk menyampaikan usulan kepada pemerintah desa untuk pembangunan kedepannya.
---	--	--

Ringkasan hasil wawancara pada tabel 5 dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam tahap perencanaan pembangunan fisik desa di Desa Bajur menjadi tantangan tersendiri bagi kepala desa agar masyarakat terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa sudah berupaya melibatkan masyarakat dengan mengundang masyarakat untuk menghadiri kegiatan musyawarah dusun ataupun desa guna merencanakan pembangunan apa saja yang akan dibangun oleh pemerintah desa untuk masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa ternyata kurang dihiraukan oleh masyarakat, ini bisa dilihat dalam kehadiran masyarakat saat diadakan musdes ataupun musdes. Akan tetapi, pihak pemerintah desa tetap menyerap ide, aspirasi dan usulan dari masyarakat yang menghadiri musdes maupun musdes untuk menetapkan pembangunan kedepannya yang nantinya akan disusun dalam RKPDes dan ditetapkan menjadi RPJMDes. Hasil penelitian ini didukung oleh dokumentasi berupa laporan hasil musrenbang, daftar hadir musrenbang, dan foto kegiatan musrenbang.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana pemerintah desa dan masyarakat melaksanakan pembangunan desa yang sudah ditetapkan dalam keputusan bersama baik di dalam musyawarah dusun maupun musyawarah desa. Dalam tahap ini diperlukannya keterlibatan-keterlibatan dari semua elemen seperti pemerintah desa, TPKD, BPD, kepala dusun, RT, dan masyarakat untuk mengontrol kegiatan selama masa pelaksanaan pembangunan desa. Hasil penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pelaksanaan

No	Item Pelaksanaan	Pelaksanaan
1	Koordinasi pelaksanaan pembangunan desa	Koordinasi tetap dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Sekdes, TPKDes, BPD, Kadus, RT, dan masyarakat demi berjalannya pelaksanaan program pembangunan secara efektif.

2	Pengendalian pembangunan desa	pelaksanaan	Tetap dilakukan pengendalian untuk mengevaluasi capaian-capaian dari pelaksanaan program pembangunan desa.
---	-------------------------------	-------------	--

Ringkasan hasil wawancara pada tabel 6 di atas dapat disimpulkan bahwa, dari pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada narasumber peneliti pada saat wawancara mengatakan hal yang sama bahwa tetap dilakukannya koordinasi dan pengendalian oleh bapak kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa bersama dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, koordinasi dan pengendalian dilakukan dalam forum musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tujuan dari koordinasi dan pengendalian dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa untuk menyesuaikan pembangunan agar tidak menyimpang dari apa yang sudah disepakati dalam forum musyawarah baik musyawarah dusun dan musyawarah desa dan untuk mengevaluasi capaian-capaian dari pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. tanpa adanya koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan maka pelaksanaan tidak terarah. Hasil dari penelitian ini didukung oleh dokumentasi berupa hasil musrenbang, daftar hadir musrenbang, dan foto kegiatan musrenbang.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap dimana masyarakat memberikan penilaian, kritik, serta saran terhadap pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pada tahap ini keterlibatan masyarakat sangat diperlukan oleh pemerintah desa, mengevaluasi pembangunan desa bertujuan untuk menjadikan pembangunan lebih baik kedepannya dengan tetap menghadiri kegiatan musyawarah dusun ataupun desa untuk melakukan perencanaan pembangunan desa. Evaluasi yang diberikan oleh masyarakat disampaikan melalui BPD dan pihak-pihak terkait, jadi penyampaian kritik dan saran diberikan kepada BPD dan nantinya BPD yang akan menyampaikan ke kepala desa. Hasil penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi

No	Item Evaluasi	Evaluasi
1	Keterlibatan masyarakat dalam tahap evaluasi pembangunan desa	Dilibatkannya masyarakat dalam tahap evaluasi untuk memberikan penilaian, kritik, saran, serta masukan melalui BPD dan nantinya BPD yang akan menyampaikan suara masyarakat ke bapak kepala desa.
2	Dukungan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam tahap evaluasi pembangunan desa	Bapak kepala desa tetap memberikan dukungan kepada masyarakat dengan memberikan ruang, kesempatan, dan peluang kepada masyarakat untuk ikut dalam tahap pembangunan desa dan memberikan pandangan bahwa masyarakat menerima manfaat dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Ringkasan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 7 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat tetap terlibat baik itu dalam tahap evaluasi terhadap pembangunan desa. Evaluasi dari masyarakat dapat memberikan masukan terhadap pembangunan kedepannya agar lebih baik lagi. Evaluasi yang disampaikan berupa penilaian, kritik, saran, serta masukan kepada pembangunan melalui BPD dan nantinya BPD yang akan menyampaikan suara dari masyarakat terkait dengan kritik dan saran yang disampaikan ke BPD. Kritik dan saran ini tetap ditampung oleh bapak kepala desa, memberikan ruang, peluang, serta kesempatan kepada masyarakat adalah cara untuk mendukung masyarakat untuk tetap terlibat dalam proses pembangunan desa, dan memberikan pandangan serta pemahaman kepada masyarakat bahwa pembangunan diperuntukan kepada masyarakat itu sendiri. Hasil dari penelitian ini didukung dengan dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara dan laporan hasil pembangunan desa.

Tahap Pemanfaatan Hasil

Tahap dimana hasil dari pelaksanaan pembangunan desa dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Pada tahap pemanfaatan hasil, masyarakat memanfaatkan hasil dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti asbes jalan yang dibuat oleh pemerintah desa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, dan inilah yang disebut bahwa pembangunan diperuntukan kepada masyarakat. Dibangun dan didukung oleh masyarakat, dan dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat itu

sendiri. Hasil penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan hasil dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8
Ringkasan Hasil Wawancara Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pemanfaatan Hasil

No	Item Pemanfaatan Hasil	Pemanfaatan Hasil
1	Antusias masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan desa	Masyarakat sangat antusias dalam memanfaatkan hasil pembangunan desa.
2	Kepedulian masyarakat dalam memelihara dan menjaga hasil dari pembangunan desa	Masyarakat sama-sama memiliki rasa peduli terhadap pembangunan desa dengan menjaga, memelihara, dan menggunakan hasil pembangunan desa sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.

Ringkasan hasil wawancara pada tabel 8 di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena masyarakat sangat antusias dalam menjaga, memelihara dan menggunakan bangunan tersebut sesuai dengan fungsi dari bangunan tersebut. Dalam hal ini masyarakat bersama-sama untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa. Seperti contoh jalan yang di rabat, pentaludan, gorong-gorong, perbaikan pustu, puskesmas, dan posyandu-posyandu ini bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan dan semuanya dimanfaatkan dengan baik dan dijaga dengan baik oleh masyarakat demi kenyamanan masyarakat sendiri. Hasil dari penelitian ini didukung dengan dokumentasi berupa laporan hasil pembangunan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah peranan kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator bisa dikatakan sudah baik. Pertama dari indikator motivator, dapat disimpulkan bahwa kepala desa sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman yang ada yaitu kepala desa berpegang pada permendagri Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana dalam Undang-Undang ini dibahas mengenai tugas kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kedua dari indikator fasilitator, dapat disimpulkan bahwa tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah desa untuk masyarakat melalui pembangunan-pembangunan desa. Ketiga dari indikator mobilisator, dapat disimpulkan bahwa kepala desa berhasil dalam memberikan dorongan kepada

masyarakat dengan cara mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam mencapai tujuan yang dibantu oleh BPD, TPKD, Sekdes, Kadus, dan RT. Partisipasi masyarakat dari indikator perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil, dapat dikatakan masih ada masyarakat yang ikut untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pertama, pada tahap perencanaan dapat disimpulkan bahwa pemberian ide, gagasan, dan usulan dari masyarakat yang menghadiri rapat saja karena kurangnya antusias masyarakat untuk menghadiri musyawarah. Kedua, dari indikator pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan kepala desa melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan melakukan koordinasi bersama sekdes, TPKD, BPD, kadus, RT, dan masyarakat desa. Ketiga, dari indikator evaluasi dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut andil dalam memberikan penilaian, karena pada tahap ini penyampaian evaluasi tidak membutuhkan waktu formal. Keempat dari indikator pemanfaatan hasil juga bisa dilihat dari hasil penelitian bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi untuk memanfaatkan hasil bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi yang luas mengenai *stewardship theory*. Dimana pemerintah desa merupakan sebuah organisasi desa memiliki pemimpin yaitu kepala desa, kehadiran dari pemimpin ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa, demi terciptanya hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat maka pemimpin harus bisa memimpin dengan baik, bijaksana, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman serta mampu mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan desa. Namun tidak hanya dari pihak pemimpin saja, pihak pemerintah desa juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari masyarakat desa untuk melakukan kerja sama agar bersama-sama membangun desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2011). Kajian Kepemimpinan Walikota Pekalongan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 78–82.
- Alfira, Y. (2020). *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemulihan Pembangunan Fisik Daerah Pasca Gempa (Studi Di Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Ardiansyah. (2013). *Studi Tentang Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Muara Pasir Kecamatan Tana Paser Kabupaten Paser*. 1(1).
- Ardiansyah, W. (2014). *Analisis Partisipasi Masyarakat Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis*. 259–273.

- Ardilah, T., Makmur, M., & Hanafi, I. (2017). Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 71–77.
- Arianto. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*.
- Bakir, R. S. (2009). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karisma Publishing Group.
- Bogdan, R. C., & Sari, B. K. (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon, Inc.
- Caselia, N. (2008). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. 840–851.
- Daft, R. L. (2013). *Manajemen*. Erlangga.
- Fahmi, I. (2018). *Pengantar Ilmu Kepemimpinan*. Rajawali Press.
- Ginting, H. (2014). *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik*.
- Griffin, R. W. (2006). *Manajemen*. Salemba Empat.
- Hakim, arif rahman, Surya, I., & Hasana, N. (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1111–1124.
- Hardianingsih, Pancawati, Meita, R. O., & Srimindarti, C. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menuju Good Governance. *Jurnal STIE Semarang*, 11(3), 1–21.
- Humapi, M, O., & A, L. (2017). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 46(3).
- Ibran. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan). *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 3(2), 120–137.
- Isbandi, R. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*.
- Jefri, & Reny. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E. (2015). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(2), 1–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Lagantondo, H. (2019). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tempemadoro Kecamatan Lage Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 12(1), 43–52.
- Lamangida, T., Akbar, M. F., & Hasan, H. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.1.68-78.2017>
- Lantaeda, S. brigette, Lengkong, florence daicy j., & Ruru, joorie m. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).

- Lingga, E. S. (2015). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Panggak Darat Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- Masruhin, M. F., Azhari, A. K., & Boedijno. (2015). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan (Studi Gaya Kepemimpinan di Desa Maron Kulon Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universtias Jember*, 1(1), 1–12.
- Melis, Muthalib, A. A., & Apoda. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 99–105. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JE%0Ahttp://ojs.uho.ac.id/index.php/JE/article/view/974/620>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Moniaga, & Leonard, S. (2018). Perbandingan Gaya Kepemimpinan Agency dan Stewardship Theory Pada Generasi X dan Generasi Y Dalam Perusahaan Keluarga. *Jurnal Manajemen Dan Star-Up Bisnis*, 2(6), 742–751.
- Muklis, H. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Nainggolan, H. E. (2017). *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Aek Raso Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan*. Universitas Sumatera Utara.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Ndaraha. (1990). *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Rineka Cipta.
- Nosihana, Ariefia, & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104.
- Nur, F., Bulkis, S., & Hamka Naping. (2007). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba)*. 4(1), 1–8.
- Pamudji. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Purba, & Ngatno. (2016). Pengaruh Peran Pemimpin Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(5).
- Purnama, I. (2017). *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Desa (Studi Desa Pendere Saril Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)*. Universitas Medan Area.
- Rismayana, B. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Mendik Makmur Kecamatan Longkali Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 23–26.
- Robbins, stephen P. (2004). *Perilaku Organisasi*. PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Salma, S. A., Putri, V. A., Fikri, A. F., & Nawangsari, E. R. (2021). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5), 5–24.
- Sari, Z. K. (2020). *Analisis peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa padang mutung kecamatan kampar kabupaten kampar*. UIN Suska Riau.

- Sastropoerto. (1998). *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan*. Alumni Bandung.
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Septia, E., & Pebriyenni. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bendung Air Timur. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(2), 129. <https://doi.org/10.31314/pjia.7.2.129-135.2018>
- Sineke, A., Gosal, R., & Lopian, M. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Atoga Timur Kecamatan Motongkad. *Jurnal Eksekutif*.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmana, E., & Islamy, H. (2019). Peranan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 96.
- Supriadi, D. (2021). Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ganec Swara*, 15(1), 921. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.192>
- Sutarto. (2009). *Dasar-Dasar Organisasi*. Ugm Press.
- Trisnani. (2017). Peran KIM Daerah Tertinggal dalam Memanage Informasi untuk Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.31504/komunika.v6i1.987>
- Wijono, S. (2018). *Kepemimpinan Dalam Perspektif Organisasi*. Prenadamedia Group.
- Yasin, N. A., Pakaya, A., & Radjak, L. I. (2016). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat di Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(1)